



Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Bank Sampah di Kecamatan Blimbing, Kota Malang

Destarika Nurrahma Anggraeni*, Kariana Ratri, Cintya Nabilla Asrori, Nazwa Naruvia Ananta, Katrine Noviyola Tampubolon

Universitas Brawijaya

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan collaborative governance dalam pengelolaan bank sampah di Kecamatan Blimbing, Kota Malang, khususnya Kelurahan Bunulrejo. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan bank sampah melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dengan peran yang saling melengkapi. Kolaborasi tersebut berdampak pada pengurangan volume sampah, peningkatan kesadaran lingkungan, serta terciptanya nilai ekonomi bagi masyarakat. Namun, keberlanjutan program masih menghadapi tantangan berupa rendahnya partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan kolaborasi antaraktor untuk mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Bank Sampah, Pengelolaan Sampah

DOI: <https://doi.org/10.47134/par.v3i3.6031>

*Correspondence: Destarika Nurrahma Anggraeni

Email: tatastudy@student.ub.ac.id

Received: 07-05-2026

Accepted: 07-06-2026

Published: 07-07-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in waste bank management in Blimbing District, Malang City, particularly in Bunulrejo Village. The research employed a qualitative method using interviews, observations, and literature studies. The findings show that waste bank management involves collaboration among government, community, and private sector actors with complementary roles. This collaboration contributes to waste reduction, increased environmental awareness, and the creation of economic value for the community. However, program sustainability still faces challenges related to community participation and institutional strengthening. Therefore, stronger regulations and stakeholder collaboration are needed to support sustainable waste management.*

Keywords: *Collaborative Governance, Waste Bank, Waste Management*

Pendahuluan

Permasalahan sampah di Indonesia masih menjadi tantangan serius akibat meningkatnya timbulan sampah yang belum diimbangi kapasitas pengelolaan. Budiarto et al. (2025) menyoroti lemahnya kelembagaan dan kolaborasi sebagai penyebab utama, sejalan dengan Asteria dan Heruman (2016) yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat serta dukungan pemerintah. Sementara itu, Purba et al. (2022) menemukan bahwa pendekatan ekonomi sirkular berpotensi meningkatkan pengelolaan sampah, tetapi masih terkendala koordinasi antar-pemangku kepentingan. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum banyak mengkaji mekanisme *collaborative governance*. Menurut Ansell dan Gash (2008, p. 544), "*Collaborative governance is a governing arrangement where one or more*

public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process." Oleh karena itu, kajian mengenai tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah masih diperlukan.

Salah satu upaya yang dikembangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah program bank sampah. Program ini menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dengan mengubah sampah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Selain berkontribusi dalam pengurangan volume sampah, bank sampah juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Namun, keberhasilan pengelolaan bank sampah sangat bergantung pada keterlibatan berbagai aktor, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta.

Dalam konteks tersebut, konsep *collaborative governance* menjadi penting karena menekankan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam menyelesaikan permasalahan publik. Kota Malang merupakan salah satu daerah yang mengembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program bank sampah. Salah satu wilayah yang aktif mengembangkan program ini adalah Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing. Meskipun demikian, masih ditemukan berbagai kendala seperti belum optimalnya koordinasi antar aktor, rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, serta tantangan dalam menjaga keberlanjutan program.

Penelitian terdahulu umumnya membahas bank sampah dari aspek lingkungan dan ekonomi, sedangkan asus pengelolaan bank sampah di Kecamatan Blimbing, khususnya Kelurahan Bunulrejo, dipilih karena menunjukkan keterlibatan berbagai aktor, seperti pemerintah kelurahan, pengelola bank sampah, masyarakat, serta pihak swasta dalam upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Kondisi ini menjadikan Bunulrejo sebagai kasus yang representatif untuk mengkaji penerapan *collaborative governance* pada tingkat lokal. Selain itu, keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan bank sampah di wilayah tersebut menunjukkan adanya dinamika kolaborasi antar aktor yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut, sehingga dapat menjadi contoh bagi pengelolaan bank sampah di wilayah lain.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan bank sampah di Kecamatan Blimbing, khususnya Kelurahan Bunulrejo, serta mengidentifikasi peran dan kontribusi para aktor yang terlibat dalam mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Metodologi

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berakar pada tradisi ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau kemanusiaan secara mendalam (Creswell, 2014). Pendekatan kualitatif dipilih karena *collaborative governance* adalah fenomena yang bersifat prosedural dan relasional yang tidak sekadar diukur dengan indikator numerik, melainkan harus dipahami melalui dinamika interaksi, negosiasi, konflik, dan konsensus antar aktor yang terlibat. Penelitian ini bertujuan menjawab

pertanyaan "bagaimana" pola kolaborasi terbentuk dan "mengapa" kolaborasi tersebut dapat atau tidak dapat berjalan secara efektif.

Untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini secara ketat menerapkan tiga prosedur validasi: triangulasi, member checking, dan peer debriefing ([Creswell & Miller, 2000](#)). Pertama, triangulasi dilakukan dengan menggunakan triangulasi teknik (menggabungkan dan menyilangkan data dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumen tertulis) serta triangulasi sumber (membandingkan informasi yang didapat dari pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat). Kedua, prosedur member checking dilakukan dengan mengembalikan transkrip wawancara dan ringkasan temuan sementara kepada para informan kunci. Hal ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada informan untuk mengklarifikasi, memverifikasi keakuratan informasi, dan memastikan bahwa interpretasi peneliti selaras dengan maksud pernyataan mereka. Ketiga, peer debriefing (pemeriksaan sejawat) diterapkan melalui diskusi kritis dengan rekan akademisi yang tidak terlibat langsung dalam penelitian ini, guna mengevaluasi proses metodologi, menantang asumsi peneliti, serta meminimalisir bias subjektif selama analisis data ([Creswell & Miller, 2000](#)).

Pengumpulan data utama dilakukan melalui instrumen wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dipilih karena banyak aspek dari proses collaborative governance bersifat tacit knowledge (pengetahuan yang hidup dalam praktik), seperti pembentukan kepercayaan antar aktor dan resolusi konflik. Adapun protokol wawancara dilaksanakan menggunakan pendekatan semi-terstruktur. Peneliti menyusun panduan wawancara (interview guide) berdasarkan kerangka teori Collaborative Governance oleh Ansell dan Gash (2007) guna memastikan pertanyaan tetap fokus pada substansi penelitian. Protokol ini mencakup permohonan persetujuan kesediaan (informed consent) dari informan, penggunaan alat perekam suara (audio recorder), serta pencatatan catatan lapangan (field notes). Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan durasi berkisar antara 45 hingga 60 menit per informan untuk menggali jawaban secara mendalam.

Strategi observasi yang diterapkan adalah observasi partisipan pasif (passive participant observation), di mana peneliti hadir di lokasi penelitian tanpa terlibat dalam aktivitas yang berlangsung. Observasi bertujuan untuk memverifikasi informasi wawancara dengan realitas lapangan. Periode observasi dilaksanakan secara intensif di lokasi operasional Bank Sampah Kecamatan Blimbing dan Kelurahan Bunulrejo pada tanggal 11 Mei 2026, dengan durasi pengamatan dari pukul 08.00 hingga 15.00 WIB. Selama periode ini, peneliti memfokuskan pengamatan pada kondisi infrastruktur fisik bank sampah, alur operasional penimbangan, serta pola interaksi dan komunikasi aktual antar aktor. Sebagai penguat temuan, peneliti menggunakan sumber dokumentasi pendukung. Sumber dokumentasi utama yang dianalisis mencakup Surat Keputusan (SK) pembentukan dan struktur kepengurusan bank sampah dari kelurahan, laporan penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak swasta, buku rekapitulasi tabungan sampah nasabah, serta peraturan daerah perihal pengelolaan sampah ([Miles, Huberman, & Saldaña, 2014](#)).

Dalam studi collaborative governance, keterlibatan para aktor yang mewakili unsur pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta menjadi sangat krusial. Dalam artikel ini, informan dipilih untuk mewakili ketiga unsur tersebut. Informan pertama dan kedua adalah perwakilan pemerintah, yakni pejabat tingkat Kecamatan Blimbing dan Kelurahan Bunulrejo yang berperan sebagai fasilitator infrastruktur dan pembuat regulasi terkait pengelolaan sampah. Informan ketiga adalah perwakilan sektor swasta, yaitu manajemen PT. Namdhari Seeds Indonesia—perusahaan di bidang perbenihan hortikultura—yang memberikan dukungan CSR berupa penyediaan tong sampah dan bibit tanaman. Informan keempat adalah perwakilan tokoh dan warga masyarakat di lingkungan Kelurahan Bunulrejo guna mengetahui tingkat partisipasi dan pemahaman mereka mengenai masifikasi bank sampah.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Proses ini melibatkan tiga aktivitas utama yang berlangsung secara bersamaan. Pertama, kondensasi data (data condensation), yakni proses menyeleksi, menyederhanakan, dan memfokuskan data mentah dari transkrip wawancara dan catatan lapangan pada poin-poin yang berkaitan dengan elemen kolaborasi. Kedua, penyajian data (data display), di mana data yang telah disaring diorganisasikan dalam bentuk teks naratif dan matriks untuk melihat relasi antar aktor. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification), yaitu merumuskan temuan baru dan menjawab rumusan masalah berdasarkan bukti-bukti yang kokoh, di mana kesimpulan akhir ini telah diuji kembali validitasnya menggunakan metode member checking dan triangulasi ([Miles et al., 2014](#)).

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Bank Sampah Kecamatan Blimbing

Kecamatan Blimbing merupakan salah satu Kecamatan di Kota Malang yang memiliki tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi dan aktivitas ekonomi yang berkembang pesat. Kondisi tersebut berimplikasi pada meningkatnya volume sampah rumah tangga maupun sampah dari sektor perdagangan dan jasa. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengelola bank sampah menyatakan bahwa *“partisipasi warga dalam kegiatan menabung sampah terus meningkat seiring dengan adanya sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan secara rutin.”* Selain itu, hasil observasi menunjukkan adanya kegiatan pemilahan sampah, pencatatan tabungan nasabah, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam operasional bank sampah di Kelurahan Bunulrejo.

Oleh karena itu, pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program bank sampah menjadi salah satu strategi yang dikembangkan untuk mengurangi timbulan sampah sekaligus meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat. Bank sampah di Kelurahan Bunulrejo yang merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Blimbing berperan sebagai bagian dari jaringan pengelolaan sampah masyarakat yang dibina oleh Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Bank Sampah Malang. Program ini menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dengan mekanisme menyerupai sistem perbankan, yaitu masyarakat menabung sampah anorganik yang telah dipilah dan

memperoleh nilai ekonomi dari hasil penjualannya. Keberadaan bank sampah tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengurangan sampah, tetapi juga sebagai media edukasi lingkungan bagi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa bank sampah mampu mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memberikan manfaat ekonomi bagi nasabahnya ([Sujiyanto, 2016](#))

Secara kelembagaan, pengelolaan bank sampah di wilayah Kelurahan Bunulrejo melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah daerah, pengurus bank sampah unit di tingkat RT/RW, kader lingkungan, PKK, sekolah, hingga masyarakat sebagai nasabah. Kolaborasi tersebut menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan salah satu faktor utama dalam pencapaian target pengurangan sampah daerah, meskipun masih terdapat tantangan berupa rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya.

Selain berorientasi pada aspek lingkungan, bank sampah di Kelurahan Bunulrejo juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Melalui kegiatan penimbangan dan penjualan sampah, masyarakat memperoleh tambahan pendapatan yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Konsep ini menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi sehingga mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri. Temuan penelitian mengenai dampak ekonomi bank sampah di Kota Malang menunjukkan bahwa keberadaan bank sampah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Aktor-Aktor yang terlibat dalam pengelolaan bank sampah

Pengelolaan bank sampah di Kecamatan Blimbing merupakan salah satu bentuk implementasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara kolaboratif. Program ini tidak hanya bertujuan mengurangi volume sampah yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan serta menciptakan nilai ekonomi dari sampah yang dapat didaur ulang. Menurut Asteria dan Heruman (2016), keberhasilan bank sampah sangat ditentukan oleh keterlibatan berbagai aktor yang mampu membangun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, keberadaan berbagai aktor dalam pengelolaan bank sampah di Kecamatan Blimbing menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas program tersebut. Salah satunya terdapat kelurahan di Kecamatan Blimbing yang berkolaborasi dengan pihak swasta yaitu terdapat di Kelurahan Bunulrejo

Pengelolaan bank sampah yang terletak di Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing Kota Malang. Program bank sampah ini hadir untuk inovasi yang mengubah paradigma atau pandangan terhadap masyarakat, dari yang sebelumnya dianggap sebagai barang tidak bernilai menjadi sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi dan sosial.

Pada pengelolaan bank sampah tidak hanya terdapat satu aktor tetapi juga membutuhkan pihak lain untuk nantinya dapat berkolaborasi bersama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program. Keterlibatan aktor-aktor tersebut menunjukkan bahwa adanya peran dan penerapan prinsip tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yaitu pola kerja sama antara pemerintah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendukung lainnya dalam menyelesaikan permasalahan publik secara bersama-sama. Menurut Asteria dan Heruman (2016), keberhasilan program bank sampah sangat ditentukan oleh kemampuan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun partisipasi masyarakat serta menciptakan sistem kelembagaan yang mampu mendorong pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Pada Aktor Pertama yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang yang memiliki peran sentral dalam pengelolaan bank sampah. Sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab pada bidang pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan. DLH memiliki fungsi sebagai regulator, fasilitator, sekaligus pembina dalam penyelenggaraan program bank sampah. Peran regulator diwujudkan melalui penyusunan kebijakan, pedoman teknis, serta program-program pengurangan sampah yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. DLH juga memberikan pembekalan kepada masyarakat, seperti pelatihan pemilahan sampah, pengolahan sampah organik dan anorganik, pendampingan kelembagaan bank sampah, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengelolaan sampah ([Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, 2019](#)).

Aktor selanjutnya yaitu pihak dari Kelurahan Bunulrejo yang berperan sebagai penghubung antara pemerintah kota dengan masyarakat. Pemerintah kelurahan bertanggung jawab dalam memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok pengelola bank sampah, mengoordinasikan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, serta mendorong partisipasi warga dalam berbagai program lingkungan. Salah satu bentuk inovasi yang telah dilakukan pihak Kelurahan Bunulrejo yaitu pengembangan Kampung Edukasi Herbal dan Zero Waste di RW 19 Bunulrejo yang mengintegrasikan konsep pengelolaan sampah, penghijauan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Program yang telah dilakukan tersebut memperlihatkan bahwasannya pemerintah kelurahan tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong lahirnya berbagai inovasi lokal dalam pengelolaan lingkungan (Pemerintah Kelurahan Bunulrejo. (2020). *Kampung Edukasi Herbal dan Zero Waste RW 19 Bunulrejo.*)

Aktor selanjutnya yaitu pada peran dan hadirnya, Bank Sampah Malang (BSM) sebagai bank sampah induk Kota Malang juga menjadi salah satu aktor yang memiliki peran penting dalam pengelolaan bank sampah di Kelurahan Bunulrejo. BSM berfungsi sebagai lembaga yang melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengembangan jaringan pemasaran hasil pemilahan sampah dari berbagai bank sampah unit yang tersebar di Kota Malang. Kehadiran BSM memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari sampah yang mereka kumpulkan melalui sistem tabungan sampah. Dalam mekanisme ini, sampah yang telah dipilah sesuai jenisnya akan ditimbang dan dicatat sebagai saldo tabungan yang dapat dicairkan dalam bentuk uang pada waktu tertentu.

Pada pihak aktor lain yaitu yang turut berperan dalam pengelolaan bank sampah di Kelurahan Bunulrejo adalah pengurus bank sampah unit yang berada di tingkat RT maupun RW. Pengurus bank sampah merupakan kelompok masyarakat yang secara langsung bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan bank sampah di lingkungan masing-masing. Tugas mereka meliputi pencatatan administrasi, pengelolaan tabungan nasabah, pelaksanaan kegiatan penimbangan sampah, penyimpanan sementara sampah yang telah dipilah, hingga koordinasi dengan Bank Sampah Malang terkait penjualan hasil pengumpulan sampah. Selain menjalankan fungsi administratif, pengurus bank sampah juga berperan sebagai motivator yang mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah. Mereka sering kali menjadi pihak yang melakukan pendekatan langsung kepada warga, memberikan edukasi mengenai manfaat bank sampah, serta mengajak masyarakat untuk membiasakan diri memilah sampah dari rumah tangga.

Pada aspek pemberdayaan masyarakat juga terdapat peran lembaga Tim Penggerak PKK, kader lingkungan. PKK sebagai organisasi kemasyarakatan yang banyak melibatkan perempuan dan ibu rumah tangga berperan aktif dalam menanamkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta mengelola sampah secara bijak. Sementara itu, kader lingkungan berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang bertugas mengedukasi masyarakat mengenai prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) serta mengawal pelaksanaan berbagai kegiatan lingkungan di tingkat komunitas.

Selain dengan adanya kehadiran pemerintah, masyarakat di Kelurahan Bunulrejo juga melibatkan aktor swasta yang membantu proses bank sampah. Pihak swasta yang terlibat yaitu PT Namdhari Seeds Indonesia melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Keterlibatan perusahaan ini diwujudkan melalui pemberian bantuan berupa 1.000 bibit tanaman dan 100 tong sampah kepada masyarakat Bunulrejo pada tahun 2023. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung kegiatan urban farming serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan. Kehadiran PT Namdhari Seeds Indonesia menunjukkan bahwa sektor swasta tidak hanya berorientasi pada aktivitas bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam mendukung pembangunan masyarakat dan lingkungan (Pemerintah Kota Malang, 2023). Dengan adanya keterlibatan aktor Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pengelola bank sampah, dan sektor swasta seperti PT Namdhari Seeds Indonesia menjadi bentuk nyata penerapan tata kelola kolaboratif yang mampu memperkuat keberlanjutan program lingkungan di tingkat kelurahan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pengelola bank sampah, dan sektor swasta seperti PT Namdhari Seeds Indonesia menjadi bentuk nyata penerapan tata kelola kolaboratif yang mampu memperkuat keberlanjutan program lingkungan di tingkat kelurahan ([Ansell & Gash, 2008](#)).

Manfaat ekonomi dari pengelolaan bank sampah di Kelurahan Bunulrejo dapat diukur secara konkret melalui sistem tabungan sampah yang diintegrasikan oleh unit-unit RT/RW dan Bank Sampah Malang. Melalui mekanisme ini, sampah anorganik (plastik, kertas, kardus, logam, botol) dikonversi menjadi nilai tukar mata uang (Rupiah) yang langsung tercatat di buku tabungan nasabah. Berdasarkan penelitian Asteria dan Heruman

(2016), bank sampah mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui insentif berbasis partisipasi. Keberhasilan penciptaan nilai ekonomi (economic value creation) ini dapat dievaluasi melalui beberapa indikator terukur (measurable indicators), yaitu: (1) peningkatan jumlah nasabah aktif per tahun; (2) total akumulasi volume sampah yang dicegah masuk ke TPA (kg/bulan); dan (3) nominal omzet atau nilai tabungan yang dikonversikan ke dalam saldo masyarakat (Rp/bulan).

Sebagai representasi dampak ekonomi berskala mikro, berikut adalah rekapitulasi data setoran Bank Sampah di Kecamatan Blimbing selama periode Mei 2025 hingga Mei 2026:

Tabel 1. Setoran Bank Sampah di Kecamatan Blimbing selama periode Mei 2025 hingga Mei 2026

No	Bulan	Tahun	Nominal	Keterangan
1.	Mei	2025	Rp. 45.100	Tunai
2.	Juni	2025	Rp. 38.350	Tunai
3.	Juli	2025	Rp. 42.500	Tunai
4.	Agustus	2025	Rp. 46.250	Tunai
5.	September	2025	Rp. 52.100	Tunai
6.	Oktober	2025	Rp. 32. 800	Tunai
7.	November	2025	Rp. 38.320	Tunai
8.	Desember	2025	Rp. 22.100	Tunai
	Total		Rp. 317.430	
1.	Januari	2026	Rp. 44.300	Tunai
2.	Februari	2026	Rp. 51.630	Tunai
3.	Maret	2026	Rp. 43.530	Tunai
4.	April	2026	Rp. 61.350	Non tunai
5.	Mei	2026	Rp. 29.100	Non Tunai

Berdasarkan data pada Tabel 1, terlihat adanya konsistensi aliran pendapatan (revenue stream) bernilai ekonomi bagi nasabah. Angka transaksi yang tercatat—meski dalam skala mikro untuk satu unit pengamatan—menunjukkan bahwa sampah yang disetor menghasilkan cash flow sebesar total Rp547.430 dalam kurun waktu satu tahun pengamatan. Menariknya, pada bulan April dan Mei 2026, mulai terlihat adanya digitalisasi transaksi pencairan melalui metode "Non-Tunai", yang mengindikasikan perkembangan

sistem tata kelola keuangan bank sampah yang semakin modern. Indikator kuantitatif ini membuktikan bahwa program collaborative governance ini tidak sekadar menghasilkan dampak ekologis dengan menekan laju timbunan sampah ke TPA, melainkan sukses mentransformasi perilaku masyarakat melalui pendekatan insentif ekonomi sirkular yang terukur (Ansell & Gash, 2008).

Proses Collaborative Governance dalam Pengelolaan Bank Sampah di Kecamatan Blimbing

Pengelolaan bank sampah yang ada di Kecamatan Blimbing telah melibatkan berbagai aktor lintas sektor dalam menjalankan programnya. Pola kolaborasi ini mencerminkan model *collaborative governance* yang telah dikonseptualisasi oleh Ansel & Gash (2008), yaitu konsep tata kelola dimana Lembaga publik yang melibatkan langsung para pemangku kepentingan non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam hal komunikasi, Kecamatan Blimbing sebagai aktor pemerintah pertama dalam kolaborasi ini memfasilitasi pengelolaan bank sampah melalui koordinasi rutin, sosialisasi, serta mengadakan forum diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kelurahan Bunulrejo selaku kelurahan yang ada di Kecamatan Blimbing dan aktor pemerintah kedua memfasilitasi pengelolaan bank sampah melalui rapat rutin. Sedangkan, PT Namdhari Seeds Indonesia sebagai satu-satunya sektor swasta dalam kolaborasi ini memfasilitasi Kelurahan Bunulrejo dengan mekanisme CSR dan dialog langsung dengan pihak kelurahan sehingga dapat memperkuat jaringan komunikasi lintas sektor ([Panjaitan et al., 2019](#)). Dalam collaborative governance milik Ansel & Gash (2008), membangun kepercayaan (*trust building*) adalah modal utama untuk dalam keberlangsungan program jangka panjang.

Salah satu karakteristik dari *collaborative governance* adalah dengan adanya pembagian tugas dan peran yang jelas. Kecamatan Blimbing berperan sebagai aktor formal yang telah menjadi nasabah resmi Bank Sampah Malang, hal ini tercermin dari Kecamatan Blimbing yang terus mengikuti tarif setor sampah milik Bank Sampah Malang. Sedangkan dalam aspek operasional pemilihan dan pengangkutan sampah, Kecamatan Blimbing memakai mobil operasional sendiri untuk mengangkut sampah menuju titik penimbangan. Di sisi lain, PT Namdhari Seeds berkontribusi dengan menyumbang tong sampah juga bibit tanaman, sekaligus mendukung edukasi terhadap pengelolaan sampah dan lingkungan. Dalam kolaborasi ini, masyarakat menjadi pelaksana utama di lapangan, dimana masyarakat ini bertugas untuk membawa sampah dari rumah masing-masing dan membawanya ke kecamatan Blimbing maupun Kelurahan Bunulrejo untuk kemudian dipilah dan disetorkan ([Asteria & Heruman, 2016](#)).

Kolaborasi pengelolaan bank sampah di Kecamatan Blimbing ini telah menghasilkan dampak positif yang signifikan. Dari sisi lingkungan, volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) mengalami penurunan. Program ini juga membuat masyarakat dan juga para pemangku kepentingan memiliki budaya untuk memilah sampah yang berhasil secara bertahap. Di Kelurahan Bunulrejo, lingkungan menjadi lebih bersih dan tertata, anak-anak pun mulai terbiasa untuk membuang dan memilah sampah

sejak dini. Munculnya nilai ekonomi dari sebuah sampah yang tadinya dianggap tidak bernilai merupakan transformasi paradigma yang signifikan ([Syahli & Syahrizal, 2017](#)). Selain itu, kegiatan gotong royong turut memperkuat hubungan sosial antar warga.

Keberlanjutan dan keberhasilan program ini membutuhkan keterlibatan para aktor dan perhatian serius dalam beberapa aspek, yaitu penguatan kapasitas kelembagaan agar program tidak bergantung pada individu saja, diperlukan peningkatan konsistensi partisipasi masyarakat melalui pendekatan sosialisasi, serta dukungan regulasi yang memadai dari pemerintah daerah untuk memberikan kepastian hukum dan sumber daya bagi keberlangsungan program. Kelemahan kapasitas kelembagaan dan fragmentasi koordinasi antar sektor merupakan hambatan umum yang ditemukan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia ([Ratnasari et al., 2023](#)). Dengan fondasi kolaborasi yang ada serta dampak nyata yang telah dirasakan, jika semakin diperkuat maka pengelolaan bank sampah di Kecamatan Blimbing memiliki potensi besar untuk menjadi model pengelolaan sampah berbasis komunitas yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga menjadi inspirasi bagi wilayah lain di Kota Malang dalam pengelolaan sampah atau lingkungan yang kolaboratif.

Simpulan

Praktik collaborative governance dalam pengelolaan bank sampah di Kecamatan Blimbing, khususnya di wilayah Kelurahan Bunulrejo, telah menunjukkan perkembangan yang progresif melalui sinergi lintas sektor yang komprehensif. Tata kelola kolaboratif ini terbukti tidak hanya beroperasi sebagai formalitas administratif semata, melainkan telah membentuk pola relasi dan interaksi yang saling melengkapi antar aktor. Keterlibatan aktif dari unsur pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Blimbing, dan Kelurahan Bunulrejo) yang bersinergi dengan sektor swasta (PT Namdhari Seeds Indonesia) serta elemen masyarakat (Bank Sampah Malang, pengurus RT/RW, kader lingkungan, dan Tim Penggerak PKK) menjadi fondasi utama keberhasilan program ini. Secara analitis, efektivitas kolaborasi ini ditopang oleh proses komunikasi yang inklusif dan pembagian peran yang proporsional; pemerintah hadir sebagai fasilitator dan regulator, sektor swasta sebagai penyedia sumber daya melalui mekanisme CSR, dan masyarakat sebagai pelaksana utama di akar rumput. Sinergi ini secara nyata berdampak pada penurunan volume sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS), peningkatan kualitas kebersihan lingkungan, serta penguatan ikatan sosial antarwarga.

Sebagai implikasi penting dari temuan ini, tata kelola kolaboratif terbukti bertindak sebagai instrumen krusial yang mampu mentransformasi paradigma masyarakat—mengubah pandangan bahwa sampah adalah limbah menjadi sumber daya bernilai ekonomi sirkular—selama pembagian peran antar aktor berjalan konsisten. Secara praktis, untuk menjamin keberlanjutan program ini, disarankan agar pemerintah daerah memperkuat intervensi kebijakan yang memberikan kepastian hukum dan alokasi sumber daya operasional. Sektor swasta juga didorong untuk memperluas jangkauan CSR mereka, tidak sekadar pada fasilitas fisik, melainkan pada pendampingan manajerial, perluasan akses pasar daur ulang, dan digitalisasi sistem administrasi, guna memperkuat kapasitas

kelembagaan lokal agar tidak bergantung pada figur penggerak tertentu. Mengingat penelitian ini berfokus pada dinamika kolaborasi di satu wilayah spesifik, penelitian lanjutan sangat direkomendasikan untuk mengkaji efektivitas digitalisasi dalam sistem perbankan sampah, melakukan studi komparasi model collaborative governance di wilayah dengan demografi berbeda, serta mengevaluasi secara longitudinal tingkat kemandirian kelembagaan bank sampah setelah program intervensi pihak eksternal berakhir.

Referensi

- Anisykurlillah, R., & Sampe, S. (2024). Portrait of Environmental Governance in Waste Management in Malang City. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 22(2), 503–511. <https://doi.org/10.14710/jil.22.2.503-511>
- Asteria, D., & Heruman, H. (2016). Bank sampah sebagai alternatif strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Tasikmalaya. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 23(1), 136–141. <https://doi.org/10.22146/jml.18783>
- Awasthi, A. K. (2022). *Informal sector: A complex link to transform solid waste management in a circular economy system*. *Waste Management & Research*, 40(11), 1569–1570.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Budiarto, A., Clarke, B., & Ross, K. (2025a). Overview of waste bank application in Indonesian regencies. In *Waste Management and Research* (Vol. 43, Number 3, pp. 306–321). SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.1177/0734242X241242697>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications. https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_609332/objava_105202/fajlovi/Creswell.pdf
- Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. *Theory Into Practice*, 39(3), 124–130. https://doi.org/10.1207/s15430421tip3903_2
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. (2019). *Buku panduan pengelolaan sampah dan bank sampah Kota Malang*. Pemerintah Kota Malang.
- Faradiba, M., & Agung, M. (2023). STRATEGI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM REFORMASI PELAYANAN PUBLIK 1. In *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration* (Vol. 11). <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/iex>

- Ferronato, N., & Torretta, V. (2019). *Waste Mismanagement in Developing Countries: A Review of Global Issues*. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(6), 1060
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Pedoman pelaksanaan bank sampah untuk mendukung ekonomi sirkular dan pengurangan sampah*. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications. https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/710004/mod_resource/content/1/Buku%20Miles%20and%20Huberman.pdf
- Panjaitan, H. M., Afandi, A., & Kurniawan, D. (2019). Tata kelola kolaboratif pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Visioner*, 11(4), 505–515. <https://doi.org/10.54783/jv.v11i4.222>
- Fatimah, Y. A., dkk. (2022). *Unlocking digital technologies for waste recycling in Industry 4.0 era: A transformation towards a digitalization-based circular economy in Indonesia*. *Journal of Cleaner Production*, 357, 131911.
- Putra, W. T. (2020). Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di bank sampah. *Jambura Journal of Community Empowerment*, 69-78.
- Pemerintah Kota Malang. (2023). *PT Namdhari Seeds Indonesia salurkan bantuan 1.000 bibit tanaman dan 100 tong sampah di Kelurahan Bunulrejo*.
- Pemerintah Kelurahan Bunulrejo. (2020). *Kampung Edukasi Herbal dan Zero Waste RW 19 Bunulrejo*.
- Radyan Danar, O., Rohmasari, A., & Amelia Novita, A. (2019). Inovasi Pelayanan dalam Pengelolaan Sampah: Studi pada Bank Sampah. In *Asti Amelia Novita/ JIAP* (Vol. 5, Number 3).
- Ratnasari, S., Mizuno, K., Herdiansyah, H., & Simanjutak, E. G. H. (2023). Enhancing sustainability development for waste management through national–local policy dynamics. *Sustainability*, 15(3), 2651.
- Saputra, W., Hermansyah, M. H., & Anggraini, P. (2023). Bank sampah sebagai upaya pengelolaan sampah di perkotaan. *Environmental Science Journal (Esjo): Jurnal Ilmu Lingkungan*, 61-67.
- Saputro, Y. E., Kismartini, K., & Syafrudin, S. (2016). Pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah. *Indonesian Journal of Conservation*, 4(1).

-
- Sujiyanto, S. (2016). Analisis Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah Malang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggaladewi*, 5(3), 102218.
- Suryani, A. S. (2014). Peran bank sampah dalam efektivitas pengelolaan sampah (studi kasus bank sampah Malang). *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 5(1), 71-84.
- Syahli, R., & Syahrizal. (2017). Pengelolaan sampah berbasis modal sosial masyarakat. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 2(1), 47-59. <https://doi.org/10.24198/jsg.v1i2.13309>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39067/uu-no-18-tahun-2008>